



# ANGKRINGAN

Buletin BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

## Opini WTP Kembali Diraih DIY



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran (TA) 2018 untuk ke-Sembilan kalinya. Penyerahan LHP ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Anggota II BPK, **Agus Joko Pramono**, pada Rapat Paripurna DPRD DIY yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DIY. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD DIY, **Yoeke Indra Agung Laksana**, Pimpinan dan para Anggota DPRD, Gubernur DIY, **Sri Sultan Hamengkubuwono X** beserta jajarannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, **Yusnadewi**, dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan untuk menemukan *fraud*. Ditekankan pula bahwa, “Dalam membuat opini ini, pemeriksa tidak membuat prosedur-prosedur untuk menunjukkan secara khusus adanya kecurangan atau tindak pidana, opini ini bukan merupakan jaminan pada tingkat kebenaran yang mutlak terhadap laporan keuangan yang disajikan, atau sebagai pernyataan tentang tidak adanya *fraud*

dan kecurangan lainnya. Opini ini didasarkan pada kriteria akan: 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2. Efektivitas atas sistem pengendalian internal; 3. Penerapan standar akuntansi dan pengungkapan yang cukup. Dengan demikian maka pembaca laporan keuangan dapat menggunakan laporan ini untuk pengambilan keputusan. Meskipun demikian pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mencari *fraud* ataupun tindak pidana, namun apabila dalam proses kami menemukan adanya penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka secara spesifik kami akan menyatakan di dalam laporan tersebut untuk itu perlu ditindaklanjuti dalam pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.”

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah DIY mempunyai waktu 60 (enam puluh) hari untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP ini dengan memberikan jawaban atau penjelasan secara resmi termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakannya kepada BPK. Pemerintah Daerah DIY dapat berkomunikasi dengan Kepala Perwakilan DIY untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas. Sampai dengan Januari 2019, Pemerintah Daerah DIY telah menyelesaikan sebanyak 726 rekomendasi dari 933 rekomendasi atau sebanyak 77,81% sehingga masih terdapat 207 rekomendasi (22,19%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Ketua DPRD dan Gubernur DIY menyampaikan ucapan terima kasih pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bahan untuk evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik, transparan dan akuntabel.



OPINI WTP KEMBALI DIRAIH OLEH DAERAH BANTUL, KULON PROGO, GUNUNG KIDUL  
DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Pada hari Jumat, 24 Mei 2019 dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemda Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta sedangkan pada Senin, 27 Mei 2010 dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Pemda Bantul dan Pemda Gunungkidul, yang seluruhnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **Yusnadewi** kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, **Akhid Nuryati, SE**; Wakil Walikota Yogyakarta, **Heroe Poerwadi**; Ketua DPRD Kabupaten Bantul, **Hanung Raharjo, ST**; dan Bupati Gunungkidul, **Badingah**.

Kepala Perwakilan BPK RI mengucapkan terima kasih atas komitmen seluruh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP kembali diperoleh. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, bukan jaminan tidak adanya *fraud* yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Selanjutnya agar pejabat dalam jajaran Pemerintah Daerah diatas wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada

BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pada kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, Walikota Yogyakarta dan Bupati Gunung Kidul mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang untuk semakin transparan dan akuntabel.



# Knowledge Transfer Forum: Investigative Interview Skill dan Pengukuran Resiko Kepatuhan



Selasa, 18 Juni 2019, bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY, diselenggarakan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) dengan narasumber Iman Santoso, SE, Ak., M.S.Acc., CA, CIA, CFE, CPA. KTF kali ini mengangkat dua tema, yaitu *Investigative Interview Skill* dan Pengukuran Resiko Kepatuhan dan diikuti oleh para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DIY.

Kegiatan KTF ini dibuka langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, **Yusnadewi**. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY menyatakan bahwa para pemeriksa perlu meningkatkan keahliannya pada saat pemeriksaan seperti keahlian wawancara dan pengujian resiko kepatuhan. Yusnadewi berpesan juga agar kegiatan ini dapat diikuti dengan serius agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah

bagi pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DIY.

Dalam paparannya, Iman menyampaikan teknik dan strategi wawancara yang baik dan benar agar informasi yang diinginkan dapat diperoleh. Iman juga memberikan informasi bagi pemeriksa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi risiko dalam pemeriksaan yaitu bagaimana cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dan mengendalikan risiko tersebut.

Melalui KTF ini, para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DIY diharapkan dapat meningkatkan wawasannya sehingga permasalahan non-teknis yang dihadapi dalam pemeriksaan dapat diatasi sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan dalam pemeriksaan tersebut.



## KUNJUNGAN KERJA KETUA BPK RI



Dalam rangka kunjungan kerja, Jumat, 21 Juni 2019, bertempat di Ruang Auditorium Balai Diklat PKN Yogyakarta, Ketua BPK RI, **Moermahadi Soerja Djanegara**, didampingi oleh Sekjen BPK RI, **Bahtiar Arif**, Kepala Ditama Revbang, **Slamet Kurniawan**, dan Kepala Badan Diklat PKN, **Heru Subowo** yang didampingi oleh Kepala Perwakilan DIY Yusnadewi dan Kepala Balai Diklat PKN Yogyakarta Mamik Mis Chastina.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Ketua BPK RI, berkesempatan untuk meninjau infrastruktur pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur lalu dilanjutkan ke Yogyakarta. Pada BPK

Perwakilan Provinsi DIY, dilakukan tanya jawab langsung dengan pegawai BPK mengenai kesejahteraan, kinerja pegawai, motivasi dan mutasi kerja pegawai. Dalam sesi tanya jawab ini, para pimpinan mengharapkan masukan langsung dari para pegawai sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan bagi BPK secara keseluruhan di masa yang akan datang.



## Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Prov. DIY



Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, pada hari Rabu, 19 Juni 2019 bertempat di Auditorium Badan Diklat PKN Yogyakarta, dilakukan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY kepada seluruh pegawai BPK RI Perwakilan DIY dan Balai Diklat PKN Yogyakarta.

Kepala Perwakilan, Yusnadewi, dalam sambutannya mengharapkan seluruh peserta sosialisasi mendapat informasi yang baik dari BNN dan terhindar dari

ketidaktahuan akan bahaya narkoba, memberikan edukasi bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat disekitarnya, dan mampu mengantisipasi cara-cara pencegahan narkoba masuk ke keluarga.

Bambang Wiryanto, selaku pemateri dari BNNP DIY, mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba dan membutuhkan peran yang nyata bagi masyarakat untuk memahami dan menghindari akan bahaya narkoba ini. Disampaikan pula kondisi terkini perihal penyalahgunaan narkoba di Indonesia, informasi perihal jenis, sifat, efek samping narkoba dan sanksi pidananya. Dalam kesempatan ini dilakukan pengetesan kadar narkoba melalui tes urin seketika kepada seluruh peserta sosialisasi.

## Sosialisasi Program Taspen



Pada hari Jumat, 21 Juni 2019 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DIY, diselenggarakan Sosialisasi Program Taspen bagi seluruh pegawai. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara BPK Perwakilan Provinsi DIY dan PT Taspen (Persero) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai peserta Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Kegiatan ini mendapat sambutan yang positif bagi pegawai BPK RI dengan banyaknya kehadiran dan diharapkan peserta dapat memahami hak dan kewajibannya dan dapat mengajukan proses pemberkasan klaim apabila dibutuhkan.

# Galeri Foto



Upacara Hari Kelahiran Pancasila di Kantor Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta



Pengarahan dan Buka Bersama Anggota D di Auditorium Balai Diklat BPK Yogyakarta, 24 Mei 2019



Kunjungan SMK Seputih Surabaya, Lampung Tengah di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 30 April 2019



Kunjungan dari Yayasan Slukat Bali

## Laporkan Indikasi Tindakan Pelanggaran di Lingkungan BPK

SILAHKAN MELAPOR KE



SUBBAGIAN HUKUM

Kriteria Pengaduan memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Sekertaris Jenderal BPK No. 507 Tahun 2011

atau

[wbs.bpk.go.id](http://wbs.bpk.go.id)

cara pelaporan melalui [wbs.bpk.go.id](http://wbs.bpk.go.id)



3

### Lapor

Klik menu "Lapor" untuk merekam pengaduan baru



1

### Login

Klik tombol "Login", lalu isikan Username dan Password Anda



### Daftar

Jika Anda belum terdaftar, maka klik tombol "Daftar" dan isikan data diri Anda lalu klik tombol "Daftar", maka Anda akan otomatis login ke Aplikasi.

- Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi yang anda ketahui sendiri
- Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda



5

### Simpan Nomor Register

Halaman berikutnya memberi kesempatan bagi anda yang ingin mencetak nomor register pengaduan.

- Catat dan simpan dengan baik Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password).
- Simpan dengan baik nomor register yang Anda peroleh saat melakukan pengaduan untuk mengetahui status/tindak lanjut pengaduan yang anda sampaikan.
- BPK RI akan menghubungi Anda melalui saluran yang telah anda cantumkan dalam form pengaduan apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

4



### Isi Form

Isi form Laporan sesuai informasi yang anda ketahui, lalu klik tombol "Laporkan"

- Seluruh isian wajib diisi
- Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.